

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1. 1 Latar Belakang	1
1. 2 Landasan Hukum	2
1. 3 Maksud dan Tujuan	5
1. 4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	9
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018	9
2. 1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
□ Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan.	16
□ Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan.	16
□ Realisasi Program/Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan.	19
□ Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan.	19
□ Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah.	23
□ Kebijakan/Tindakan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut.	23
2. 2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	34
2. 3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	37
2. 4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	40
2. 5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	43
BAB III	44
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	44
3. 1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional	44
3. 2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	44
BAB IV	46
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	46
4. 1 Program dan Kegiatan	46
BAB V	55
PENUTUP	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Program, kegiatan, sub kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu, kerangka pendanaan dan pagu indikatif, dan urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Penyusunan dan Penetapan Renja Perangkat Daerah merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang didahului dengan penyusunan rancangan awal, forum SKPD dan Musrenbang sebagai wadah menampung aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran anggota DPRD, sehingga dapat mewujudkan suatu perencanaan pembangunan yang partisipatif.

Mengawali persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah ini, telah dibentuk Tim Penyusun Renja Biro Umum yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Tim penyusun ini melaksanakan tugasnya mulai dari mengumpulkan data, menganalisis, menelaah dokumen yang diperlukan, sampai pada merumuskan dan menyusun dokumen Renja Biro Umum.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Biro Umum mempunyai arti penting dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan diterjemahkan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Perangkat Daerah guna mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 ini mempedomani Rencana Strategis Biro Umum Tahun 2022-2026.

1.2 Landasan Hukum

Renja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tk.I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 144);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
23. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2009 tentang Prosedur Pelayanan Tamu (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009 Nomor 49);
24. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat; dan
25. Surat Edaran Gubernur: 050/2613/II/Bappeda-2021 Tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan kebijakan umum anggaran (KUA), merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dituangkan dalam RKA Biro Umum Tahun Anggaran 2023 serta mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan Tahun Anggaran 2021.

Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Biro Umum Tahun 2023 ini adalah sebagai bahan penyusunan RKPD Tahun 2023 yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah

1.2 Landasan Hukum

Memuat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi, Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menguraikan hasil kajian terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, serta Tabel rencana program dan kegiatan

BAB IV PENUTUP

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, Kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2021, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat menjalankan 1 (satu) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 47 (empat puluh tujuh) sub kegiatan sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:
 - a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - c. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:
 - a. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
 - b. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - g. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pengadaan Mebel
- d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

10. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah
- c. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- d. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

11. Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah

Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

- a. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
- b. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
- c. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

12. Fasilitasi Keprotokolan

Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini adalah:

- a. Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara
- b. Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- c. Pengelolaan Hubungan Keprotokolan

Alokasi anggaran pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021, dengan total pagu sebesar **Rp. 89.024.556.272,-** pada anggaran murni dan menjadi **Rp. 102.967.154.254,-** pada perubahan anggaran, dengan realisasi sebesar **Rp. 98.218.385.925,- (95,39%)**. Rincian realisasi anggaran belanja langsung Biro Umum Tahun Anggaran 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Realisasi Anggaran Belanja Langsung TA. 2021

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI (Rp)	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	102.967.154.254	98.218.385.925	95,39
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	511.473.100	498.022.804	97,37
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	237.081.400	230.428.404	97,19
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	158.455.600	154.432.300	97,46
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	115.936.100	113.162.100	97,61
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45.891.608.731	44.258.127.529	96,44
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	44.984.238.345	43.374.952.948	96,42
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	444.876.956	441.883.750	99,33
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	174.987.830	172.483.400	98,57
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	228.662.100	222.586.931	97,34
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Hasil Pemeriksaan	58.843.500	46.220.500	78,55
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	622.022.000	589.308.071	94,74
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	91.158.500	89.841.050	98,55
Pengamanan Barang Milik Daerah	438.250.000	414.887.732	94,67
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	92.613.500	84.579.289	91,33
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	114.138.000	111.374.283	97,58
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	33.047.500	31.350.021	94,86
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	81.090.500	80.024.262	98,69
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	668.568.800	642.321.783	96,07

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	546.616.600	534.050.486	97,70
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	74.511.500	69.243.097	92,93
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	47.440.700	39.028.200	82,27
Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.182.780.431	14.659.188.335	96,55
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	87.417.200	82.025.600	93,83
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.098.580.700	1.094.125.700	99,59
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	711.581.050	673.907.021	94,71
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	400.474.487	398.808.102	99,58
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	309.431.050	309.118.000	99,90
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000	21.996.520	43,99
Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.639.795.950	4.462.142.583	96,17
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.885.499.994	7.617.064.809	96,60
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.998.364.780	3.611.686.280	90,33
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.974.425.000	1.973.275.000	99,94
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	140.619.000	124.389.000	88,46
Pengadaan Mebel	345.109.060	339.514.950	98,38
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.438.211.720	1.174.507.330	81,66
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.799.530.617	12.138.592.167	94,84
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	218.035.400	192.404.530	88,24
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.236.009.548	3.053.325.831	94,35
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	540.490.000	525.289.000	97,19
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.804.995.669	8.367.572.806	95,03
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.501.639.228	8.841.698.025	93,05

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	238.225.100	236.184.736	99,14
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.695.746.700	1.679.090.274	99,02
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.589.245.199	6.069.794.715	92,12
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	978.422.229	856.628.300	87,55
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.443.578.306	4.350.781.925	97,91
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	254.512.496	226.155.523	88,86
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	361.745.000	361.745.000	100,00
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	130.000.000	65.560.592	50,43
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.697.320.810	3.697.320.810	100,00
Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	7.538.853.915	6.829.715.881	90,59
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2.752.354.655	2.531.181.903	91,96
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	2.055.661.820	1.727.218.877	84,02
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	2.730.837.440	2.571.315.101	94,16
Fasilitasi Keprotokolan	1.694.596.346	1.687.568.842	99,59
Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	8.280.000	8.280.000	100,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.446.047.846	1.440.193.746	99,60
Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	240.268.500	239.095.096	99,51
JUMLAH TOTAL	102.967.154.254	98.218.385.925	95,39

- **Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan.**

Pada pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Tahun Anggaran 2021, terdapat **3 (tiga) sub kegiatan** yang tidak memenuhi target kinerja yang kurang dari 80,00% sesuai dengan yang direncanakan, yaitu:

- 1) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Hasil Pemeriksaan, jumlah dana Rp.58.843.500,- realisasi sebesar Rp.46.220.500,- (78,55%). Serapan tidak mencapai target disebabkan ada beberapa kali lembur yang tidak dapat dibayarkan karena batas pelaksanaan lembur hanya 15 jam per orang per bulan.
- 2) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, jumlah dana Rp.50.000.000,- realisasi sebesar Rp.21.996.520,- (43,99). Serapan tidak mencapai target disebabkan Bahan bacaan yang diminta hanya dari Kepala Daerah, sedangkan Wakil Kepala Daerah dan Sekda tidak ada tagihan pembelian bahan bacaan.
- 3) Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, jumlah dana Rp.130.000.000,- realisasi sebesar Rp.65.560.592,- (50,43). Serapan tidak mencapai target disebabkan Medical Check Up KDH/WKDH dilakukan satu kali tahun 2021, dan realisasi sesuai dengan tagihan medical check up KDH/WKDH

- **Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan.**

Pada pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Tahun Anggaran 2021, terdapat **17 (Tujuh Belas) sub kegiatan**, kegiatan yang penyerapan anggarannya diatas **80,00% - 95,00%**. Namun demikian, tidak begitu mempengaruhi pencapaian target hasil/keluaran berdasarkan indikator yang telah ditetapkan untuk masing-masing sub kegiatan, karena secara fisik kegiatan tersebut telah terpenuhi. 17 (Tujuh Belas) sub kegiatan dimaksud berikut penjelasannya dapat diuraikan sebagai berikut yaitu:

- 1) Pengamanan Barang Milik Daerah, jumlah dana Rp.438.250.000,- realisasi sebesar Rp.414.887.732,- (94,67). Serapan anggaran mencapai target diatas 80% dan realisasi fisik 100%, kebutuhan premi asuransi Gedung dan kendaraan terpenuhi.
- 2) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, jumlah dana Rp.92.613.500,- realisasi sebesar Rp.84.579.289,- (91,33%). Serapan anggaran mencapai target diatas 80% dan realisasi fisik 100%, rekon dan penyusunan laporan BMD terlaksana.
- 3) Perencanaan Pengelolaan Retribusi, jumlah dana Rp.33.047.500,- realisasi sebesar Rp.31.350.021,- (94,86). Serapan anggaran mencapai target diatas 80% dan realisasi fisik 100%, perencanaan pengelolaan retribusi daerah terpenuhi.
- 4) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai, jumlah dana Rp.74.511.500,- realisasi sebesar Rp.69.243.097,- (92,93%). Serapan anggaran mencapai target diatas 80% dan realisasi fisik 100%, monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai terlaksana.
- 5) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, jumlah dana Rp.47.440.700,- realisasi sebesar Rp.39.028.200,- (82,27%). Serapan anggaran mencapai target diatas 80% dan realisasi fisik 100%, ASN yang mengikuti Bimtek terpenuhi sesuai target.
- 6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, jumlah dana Rp.87.417.200,- realisasi sebesar Rp.82.025.600,- (93,83%). Serapan anggaran mencapai target diatas 80% dan realisasi fisik 100%, instalasi listrik dan penerangan bangunan terpenuhi dan terpasang.
- 7) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, jumlah dana Rp.711.581.050,- realisasi sebesar Rp.673.907.021,- (94,71%). Serapan anggaran mencapai target diatas 80% dan realisasi fisik 100%, penyediaan peralatan rumah tangga terpenuhi.

- 8) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, jumlah dana Rp. 140.619.000,- realisasi sebesar Rp.124.389.000,- (88,46%). Serapan anggaran mencapai target diatas 80% dan realisasi fisik 100%, pengadaan kendaraan dinas terlaksana.
- 9) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, jumlah dana Rp.1.438.211.720,- realisasi sebesar Rp.1.174.507.330,- (81,66%). Serapan anggaran mencapai target diatas 80% dan realisasi fisik 100%, pengadaan peralatan dan mesin terlaksana
- 10) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, jumlah dana Rp.218.035.400,- realisasi sebesar Rp.192.404.530,- (94,35%). Serapan anggaran mencapai target diatas 80% dan realisasi fisik 100%, surat menyurat terdistribusikan.
- 11) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, jumlah dana Rp.3.236.009.548,- realisasi sebesar Rp.3.053.325.831,- (94,35%). Serapan anggaran mencapai target diatas 80% dan realisasi fisik 100%, Tagihan jasa komunikasi, air dan listrik terbayarkan.
- 12) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, jumlah dana Rp.6.589.245.199,- realisasi sebesar Rp.6.069.794.715,- (92,12%). Serapan anggaran mencapai target diatas 80% dan realisasi fisik 100%, Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor terlaksana.
- 13) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, jumlah dana Rp.978.422.229,- realisasi sebesar Rp.856.628.300,- (87,55%). Serapan anggaran mencapai target diatas 80% dan realisasi fisik 100%, Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor terlaksana.
- 14) Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, jumlah dana Rp.254.512.496,- realisasi sebesar Rp.226.155.523,- (88,86%). Serapan anggaran mencapai target

diatas 80% dan realisasi fisik 100%, Gaji dan tunjangan KDH/WKDH terbayarkan.

- 15) Penyediaan kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, jumlah dana Rp.2.752.354.655,- realisasi sebesar Rp.2.531.181.903,- (91,96%). Serapan anggaran mencapai target diatas 80% dan realisasi fisik 100%, kebutuhan rumah tangga KDH terpenuhi.
- 16) Penyediaan kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah, jumlah dana Rp.2.055.661.820,- realisasi sebesar Rp.1.727.218.877,- (84,02%). Serapan anggaran mencapai target diatas 80% dan realisasi fisik 100%, kebutuhan rumah tangga WKDH terpenuhi.
- 17) Penyediaan kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah, jumlah dana Rp.2.730.837.440,- realisasi sebesar Rp.2.571.315.101,- (94,16%). Serapan anggaran mencapai target diatas 80% dan realisasi fisik 100%, kebutuhan rumah tangga Sekretaris Daerah, Istana Bung Hatta dan Mess Bukit Lampung terpenuhi.

- **Realisasi Program/Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan.**

Dari 46 sub kegiatan yang telah memenuhi target hasil/keluaran, terdapat **26 (Dua Puluh Enam)** kegiatan yang penyerapan anggarannya melebihi target yang ditetapkan **95%**.

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, jumlah dana Rp.237.081.400,- realisasi sebesar Rp.230.428.404,- (97,19). Serapan anggaran melebihi target karena seluruh dokumen perencanaan selesai dilaksanakan.
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, jumlah dana Rp.158.455.600,- realisasi sebesar Rp.154.432.300,- (97,46%) Serapan anggaran melebihi target karena laporan capaian kinerja selesai dibuat.
- 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, jumlah dana Rp.115.936.100,- realisasi sebesar Rp.113.162.100,- (97,61%). Serapan anggaran

melebihi target karena laporan fisik dan keuangan biro umum selesai disusun.

- 4) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, jumlah dana Rp.44.984.238.345,- realisasi sebesar Rp.43.374.952.948,- (96,42%) Serapan anggaran melebihi target karena gaji seluruh ASN terbayarkan.
- 5) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, jumlah dana Rp.444.876.956,- realisasi sebesar Rp.441.883.750,- (99,33%). Serapan anggaran melebihi target karena honorarium ASN terbayarkan.
- 6) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, jumlah dana Rp.174.987.830,- realisasi sebesar Rp.172.483.400,- (98,57%). Serapan anggaran melebihi target karena penatausahaan dan verifikasi setda terlaksana.
- 7) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, jumlah dana Rp.228.662.100,- realisasi sebesar Rp.222.586.931,- (97,34%). Serapan anggaran melebihi target karena pelaporan akuntansi terlaksana.
- 8) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, jumlah dana Rp.91.158.500,- realisasi sebesar Rp.89.841.050,- (98,55%). Serapan anggaran melebihi target karena perencanaan kebutuhan BMD tersusun.
- 9) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah, jumlah dana Rp.81.090.500,- realisasi sebesar Rp.80.024.262,- (98,69%). Serapan anggaran melebihi target karena laporan pengelolaan retribusi tersusun.
- 10) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, jumlah dana Rp.546.616.600,- realisasi sebesar Rp.534.050.486,- (97,70%). Serapan anggaran melebihi target karena pengadaan pakaian dinas terlaksana.
- 11) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, jumlah dana Rp.1.098.580.700,- realisasi sebesar Rp.1.094.125.700,- (99,59%).

- Serapan anggaran melebihi target karena peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi.
- 12) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, jumlah dana Rp.400.474.487,- realisasi sebesar Rp.398.808.102,- (99,58%). Serapan anggaran melebihi target karena bahan logistik kantor terpenuhi.
 - 13) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, jumlah dana Rp.309.431.050,- realisasi sebesar Rp.309.118.000,- (99,90%). Serapan anggaran melebihi target karena barang cetakan dan penggandaan terpenuhi.
 - 14) Fasilitasi Kunjungan Tamu, jumlah dana Rp.4.639.795.950,- realisasi sebesar Rp.4.462.142.583,- (96,17%). Serapan anggaran melebihi target karena kunjungan tamu terfasilitasi.
 - 15) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, jumlah dana Rp.7.885.499.994,- realisasi sebesar Rp.7.617.064.809,- (96,60). Serapan anggaran melebihi target karena kunjungan kedinasan KDH/WKDH dan ASN terlaksana.
 - 16) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, jumlah dana Rp.1.974.425.000,- realisasi sebesar Rp.1.973.275.000 (99,94%). Serapan anggaran melebihi target karena pengadaan kendaraan dinas terlaksana.
 - 17) Pengadaan Mebel, jumlah dana Rp.345.109.060,- realisasi sebesar Rp.339.514.950,- (98,38%). Serapan anggaran melebihi target karena mebel telah diadakan seluruhnya.
 - 18) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, jumlah dana Rp.540.490.000,- realisasi sebesar Rp.525.289.000,- (97,19%). Serapan anggaran melebihi target karena jasa peralatan dan perlengkapan kantor telah disediakan.
 - 19) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, jumlah dana Rp.8.804.995.669,- realisasi sebesar Rp.8.367.572.806,- (95,03%). Serapan anggaran melebihi target karena jasa pelayanan umum kantor terpenuhi.

- 20) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, jumlah dana Rp.238.225.100,- realisasi sebesar Rp.236.184.736,- (99,14%). Serapan anggaran melebihi target karena pajak dan service kendaraan dinas jabatan terpenuhi.
- 21) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan, jumlah dana Rp.1.695.746.700,- realisasi sebesar Rp.1.679.090.274,- (99,02%). Serapan anggaran melebihi target karena pajak dan service kendaraan dinas operasional atau lapangan terpenuhi.
- 22) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, jumlah dana Rp.361.745.000,- realisasi sebesar Rp.361.745.000,- (100,00%). Serapan anggaran melebihi target karena pakaian dinas KDH/WKDH terpenuhi.
- 23) Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, jumlah dana Rp.3.697.320.810,- realisasi sebesar Rp.3.697.320.810,- (100,00%). Serapan anggaran melebihi target karena dana penunjang operasional KDH/WKDH terbayarkan.
- 24) Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara, jumlah dana Rp.8.280.000,- realisasi sebesar Rp.8.280.000,- (100,00%). Serapan anggaran melebihi target karena sub kegiatan ini telah selesai dilaksanakan di biro umum per mei 2021 dan selanjutnya dipindah ke biro administrasi pimpinan.
- 25) Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, jumlah dana Rp.1.446.047.846,- realisasi sebesar Rp.1.440.193.746,- (99,60). Serapan anggaran melebihi target karena sub kegiatan ini telah selesai dilaksanakan di biro umum per mei 2021 dan selanjutnya dipindah ke biro administrasi pimpinan.
- 26) Pengelolaan Hubungan Keprotokolan, jumlah dana Rp.240.268.500,- realisasi sebesar Rp.239.095.096,- (99,51%). Serapan anggaran melebihi target karena sub kegiatan ini telah

selesai dilaksanakan di biro umum per mei 2021 dan selanjutnya dipindah ke biro administrasi pimpinan

- **Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan.**

- Tidak tercapainya target kinerja keuangan 3 sub kegiatan dimaksud, diantaranya adalah menyesuaikan dengan regulasi yang ada, kebutuhan bahan bacaan KDH/WKDH/Sekda dan kebutuhan medical check up KDH/WKDH.
- Terpenuhinya target hasil/keluaran 43 kegiatan lainnya, disebabkan faktor perbaikan proses perencanaan, perbaikan fungsi pengendalian oleh pelaksana kegiatan, serta komitmen terhadap efisiensi belanja barang/jasa.

- **Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah.**

Akibat dari 3 (tujuh) sub kegiatan yang tidak mencapai target serapan anggaran tersebut tidak begitu mempengaruhi capaian Renstra Biro Umum (pencapaian tujuan dan sasaran strategis).karena secara keseluruhan realisasi keuangan biro umum mencapai 95,39% dan fisik mencapai 100,00%.

- **Kebijakan/Tindakan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab tersebut.**

Langkah yang perlu dilakukan mengatasi hal tersebut adalah mereview dan menyesuaikan kembali jumlah belanja anggaran kegiatan yang lebih sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan yang dapat diprediksi. Sedangkan kebutuhan belanja rutin/tidak rutin yang sulit diprediksi perlu tetap dianggarkan dengan mempertimbangkan trend realisasi tahun lalu. Tindakan lainnya yang perlu diperhatikan adalah memperbaiki proses perencanaan anggaran yang lebih baik lagi, dengan cara memperoleh data-data yang lebih akurat dengan didukung dokumen yang lebih lengkap. Serta diperlukan juga komitmen dari pelaksana kegiatan dan rekanan untuk selalu menjaga integritas dan prinsip efektivitas dan

efisiensi penggunaan anggaran yang didukung dengan sistem pengendalian yang baik.

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Provinsi Sumatera Barat

Nama PD : Biro Umum (Setda)

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra Perangkat Daerah) TAHUN 2021	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (2019)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)*	11 = (10/4)
4	UNSUR PENDUKUNG									
4 01	SEKRETARIAT DAERAH									
4 01 01	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		7800 buah	6250	1550	1550	100%	1550	7800	100%
4 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kebutuhan listrik, air dan telekomunikasi OPD yang terpenuhi	12 bulan	12	12	12	100%	12	12	100%

4	01	01	03	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	Unit gedung kantor, jasa sopir kantor terpenuhi, jasa pengamanan kantor terpenuhi	8 unit/12 bulan, 27 orang/12 bulan	8 unit/12 bulan, 27 orang/12 bulan	8 unit/12 bulan, 27 orang/12 bulan	8 unit/12 bulan, 27 orang/12 bulan	100%	8 unit/12 bulan, 27 orang/12 bulan	8 unit/12 bulan, 27 orang/12 bulan	100%
4	01	01	06	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Gedung kantor dan kendaraan dinas operasional	71 unit/12 bulan	67 unit/12 bulan	67 unit/12 bulan	67 unit/12 bulan	100%	67 unit/12 bulan	67 unit/12 bulan	100%
4	01	01	08	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	1 tahun	1	1	1	100%	1	1	100%
4	01	01	09	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang menunjang operasional kantor	1 tahun	1	1	1	100%	1	1	100%
4	01	01	10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kebutuhan komponen instalasi listrik atau bangunan kantor yang tersedia	1 tahun	1	1	1	100%	1	1	100%
4	01	01	11	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kebutuhan sewa peralatan perlengkapan kantor yang terpenuhi	12 bulan	12	12	12	100%	12	12	100%
4	01	01	13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	kebutuhan buku KDH, WKDH dan Sekda terpenuhi	2 jenis	1	2	2	100%	2	2	100%

4	01	01	14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kebutuhan bahan kebersihan kantor terpenuhi	12	bulan	12	12	12	100%	12	12	100%
4	01	01	15	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang diikuti	1	tahun	1	1	1	100%	1	1	100%
4	01	01	18	Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Senam pagi bersama di kantor	12	bulan	12	44 kali / 12 bulan	44 kali / 12 bulan	100%	44 kali / 12 bulan	44 kali / 12 bulan	100%
4	01	01	24	Penyediaan Makanan dan Minuman	pertemuan/rapat yang diselenggarakan	540	kali	410	82	82	100%	130	540	100%
4	01	01	302	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gubernur dan Wakil Gubernur	1	tahun	2 orang/12 bulan	2 orang/12 bulan	2 orang/12 bulan	100%	2 orang/12 bulan	2 orang/12 bulan	100%
4	01	02		PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	01	02	01	Pengadaan Meubeleur	Meja dan Kursi Kerja, Lemari Arsip, Kursi dan Meja Tamu	60	item		Kursi rapat, Sofa tamu, Kursi pimpinan rapat, Meja untuk pelantikan, Meja resepsionis + rak	50	100%	10	60	100%

4	01	02	04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi	Peralatan studio, komunikasi dan informasi yang terpelihara	12	bulan	12	12	12	100%	12	12	100%
4	01	02	05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung Kantor yang terpelihara	42	unit	1	36	1	17%	6	42	100%
4	01	02	06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	321	unit	241	67	67	100%	81	321	100%
4	01	02	07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	12	jenis	12	16	12	75%	3	12	100%
4	01	02	09	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Komputer dan jaringan komputer yang terpelihara	12	bulan	12	128 unit	128 unit	100%	12	12	100%
4	01	02	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Gedung kantor yang direhab sedang/berat	30	unit	Rehab sedang / Berat Gedung Kantor	30	3	100%	5	30	100%

4	01	02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Instalasi dan jaringan kantor yang terpelihara	12	bulan	12	12	12	100%	12	12	100%
4	01	02	29	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Mobil jabatan yang terpelihara	50	unit	40	10	10	100%	10	50	100%
4	01	02	37	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/Operasional terpenuhi	29	unit	25	6	6	100%	4	29	100%
4	01	02	43	Pengadaan peralatan/perlengkapan rumah jabatan/dinas/mess	Jenis perlengkapan/peralatan rumah jabatan/dinas/mess	56	jenis	42	14	14	100%	14	56	100%
4	01	02	55	Pemeliharaan rutin/berkala rumah Jabatan/Dinas/Mess	Rumah jabatan, dinas, mess yang terpelihara	12	unit	12	3	12	400%	3	12	100%
4	01	02	62	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan rumah jabatan/dinas/mess	Jenis peralatan/perlengkapan rumah jabatan/ dinas/ mess yang dipelihara	12	bulan	12	13	12	92%	12	12	100%
4	01	02	362	Pembangunan Gedung Kantor	Gedung kantor yang dibangun	1	unit	1	1	1	100%	1	1	100%

4	01	02	371	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	39	item		39	39	100%	39	39	100%
4	01	03		PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	01	03	01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian dinas PNS dan Non PNS	3696	stel	Pakaian Dinas KDH/WKDH, PSH, PDH, PDU, PSL	733	733	100%	616	3696	100%
4	01	03	11	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Pakaian kerja lapangan	545	stel	95	450	95	68%	85	545	100%
4	01	03	12	Pengadaan Pakaian Dinas Khusus Hari-Hari Tertentu	Pakaian dinas khusus	383	stel	18 Stel Pakaian Batik / Tenun Tradisional, 27 Stel Pakaian Olahraga, 4 stel Pakaian Korpri	89	89	100%	49	383	100%
4	01	04		PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Terpenuhinya peningkatan Sumber Daya Aparatur	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	01	04	01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	PNS yang mengikuti Bimtek	166	orang	1 Tahun	34	34	100%	34	166	100%

4	01	05		PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	01	05	01	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Pelaksanaan Forum OPD, Rencana Kerja OPD, RKA-DPA OPD	3 dokumen	DPA, Pergeseran, DPPA	4	4	100%	4	4	100%
4	01	05	02	Penatausahaan Keuangan SKPD	KPA, PA, PPK dan PPTK serta pengelola keuangan lainnya	100 orang / 12 bulan	12 Bulan	75	25	100%	25	100	100%
4	01	05	03	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Keuangan, LAKIP, LPPD, LKPJ, RKT, RENSTRA dan Capaian Kinerja Biro Umum	28 dokumen	12 Bulan	21	7	100%	7	28	100%
4	01	05	19	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Honorarium pengelola asset	5 orang/12 bulan	5	5	5	100%	5	5	100%
4	01	06		PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN	Terpenuhinya penyediaan jasa pelayanan tamu pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	01	06	01	Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah	Tamu pemerintah daerah yang dilayani	114,000 orang	12 Bulan	76000	28000	100%	28000	114.000	100%

4	01	06	02	Peringatan hari-hari besar nasional	Peringatan hari besar nasional terlaksana	42	hari besar nasional	Hari Pendidikan Nasional, Hari Kebangkitan Nasional, Hari Proklamasi, Hari Kesaktian Pancasila, Hari Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, HUT PDRI	7	7	100%	7	42	100%
4	01	06	04	Audiensi Pimpinan Dengan Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Organisasi Lainnya	Pertemuan Pimpinan dengan Masyarakat/Tokoh Masyarakat/Ormas Lainnya	12	bulan		3	3	100%	12	12	100%
4	01	06	05	Kunjungan Kerja Kedinasan Pimpinan	Pertemuan yang dihadiri Pimpinan	12	bulan		3	3	100%	12	12	100%
1.01	03			PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1.01	03	039		PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat pengelolaan keuangan daerah pada unit SKPD	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.03	03	039	02	Pengelolaan Pemakaian Istana Bung Hatta	Kebutuhan pengelolaan gedung Istana Bung Hatta	12	bulan	12	12	12	100%	12	12	100%

1.03	03	039	04	Pengelolaan Pemakaian Gedung Rohana Kudus	Kebutuhan pengelolaan gedung Rohana Kudus	12	bulan	12	12	12	100%	12	12	100%	
3.00	02			PENUNJANG PERENCANAAN											
3.00	02	198		PENGEMBANGAN MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat pelayanan keprotokolan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.00	02	198	03	Rakor Keprotokolan	Jumlah peserta rakor	292	orang	1	kali	250	250	100%	60	310	106%
3.00	02	198	11	Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	Tenaga honor protokol yang terbayarkan jasanya	64	orang / 12 bulan	12	Bulan	16	16	100%	16	16	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Biro Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya tidak mengampu salah satu SPM untuk urusan wajib maupun indikator kinerja kunci seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sebagai unit pendukung (*supporting unit*) pada Sekretariat Daerah sesuai program prioritas pembangunan yang telah dijabarkan dari Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, Biro Umum melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi umum pemerintahan atau fungsi penunjang, antara lain : pelayanan tamu rumah tangga KDH dan WKDH, Pelayanan Pimpinan mulai dari Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Administrasi Keuangan Kesekretariatan yang berkaitan dengan **Misi ke-7 RPJMD “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas”**. pada *Tujuan* “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah dengan Aparatur yang Melayani”, *Sasaran Ketiga* “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”, dengan Indikator Kinerja “Indek Persepsi Kualitas Pelayanan”.

Untuk menentukan tolak ukur keberhasilan pelayanan Perangkat Daerah perlu dirumuskan indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah. Biro Umum sesuai dengan Renstra telah merumuskan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk menilai keberhasilan kinerja Perangkat Daerah pada Tahun 2021 sampai dengan 2026.

Indikator Kinerja Utama Biro Umum dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagaimana berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Biro Umum Tahun 2021 – 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kepuasan <i>Stakeholders</i> di bidang Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH, Pelayanan Pimpinan dan Pelayanan Adminsitarsi Keuangan Setda	IKM Pelayanan Tamu	88,31 (Sangat Baik)	88,31 (Sangat Baik)	88,31 (Sangat Baik)	88,31 (Sangat Baik)	88,31 (Sangat Baik)	88,31 (Sangat Baik)
		IKM Pelayanan Pimpinan	88,31 (Sangat Baik)	88,31 (Sangat Baik)	88,31 (Sangat Baik)	88,31 (Sangat Baik)	88,31 (Sangat Baik)	88,31 (Sangat Baik)
		IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda	88,31 (Sangat Baik)	88,31 (Sangat Baik)	88,31 (Sangat Baik)	88,31 (Sangat Baik)	88,31 (Sangat Baik)	88,31 (Sangat Baik)
2	Terwujudnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	70 (BB)	70 (BB)	70 (BB)	70 (BB)	70 (BB)	70 (BB)

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Biro Umum
Provinsi Sumatera Barat

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	I K K	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	IKM Pelayanan Tamu	-	-	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	-	-	-	
	IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH	-	-	-	-	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
2	IKM Pelayanan Pimpinan	-	-	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
	IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda	-	-	-	-	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
3	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	-	-	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Mencermati permasalahan dan telaahan terhadap tugas pokok dan fungsi, maka dirumuskan beberapa isu strategis yang terkait, antara lain:

1. Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik menjadi fokus perhatian pemerintah daerah saat ini karena besarnya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Dalam hal ini, Biro Umum memiliki peran yang strategis dalam memberikan atau memfasilitasi kegiatan Pimpinan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.
2. Sejalan dengan arah pembangunan daerah pada periode RPJMD ke-IV (2021-2026) yang diarahkan pada peningkatan daya saing daerah, serta agar dapat memberikan dukungan berupa sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai serta SDM pelayanan yang handal, maka Biro Umum memiliki peran strategis sebagai yang terdepan dalam:
 - a. Terdepan dalam Pelayanan Pimpinan terkait dengan pengendalian internal guna mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.
 - b. Terdepan dalam memberikan pelayanan kepada tamu Rumah Tangga KDH/WKDH. Untuk itu perlu menyikapinya dengan melakukan penguatan kapasitas SDM Biro Umum.
3. Salah satu faktor penting dalam membangun citra dan reputasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ditingkat nasional maupun internasional, yang ditandai dengan dibukanya Masyarakat Ekonomi Asean 2015, perlu meningkatkan daya saing daerah. Untuk itu, perlu mewujudkan pelayanan public yang prima dengan fokus perhatian kepada peningkatan kepercayaan public yang secara tidak langsung kesan yang baik tersebut akan menyebar secara utuh.

Tantangan dan peluang merupakan faktor eksternal yang akan mempengaruhi organisasi dalam mewujudkan tujuan yang hendak dicapainya. Biro Umum sebagai unit pendukung pelayanan pimpinan dan kesekretariatan kedepannya akan menghadapi tantangan yang cukup berat dalam memberikan dukungan terhadap kesuksesan tugas-tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah, dimana intensitas kunjungan kerja Pimpinan semakin tinggi dan intensitas kunjungan tamu yang juga semakin tinggi dan sulit diprediksi. Semakin tingginya intensitas pekerjaan yang dihadapi akan tetapi struktur organisasi justru mengecil, seolah menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, tantangan juga akan datang dari aspek pelayanan publik yang semakin menuntut standar pelayanan prima. Sehingga faktor kualitas SDM dan Sarana dan Prasarana menjadi dua aspek yang harus diperhatikan.

Berperan sebagai *supporting unit* Pelayanan Tamu, Pelayanan Pimpinan dan Pelayanan Administrasi Keuangan Setda, Biro Umum turut mengembangkan inovasi di bidang pelayanan publik, diantaranya adalah peminjaman fasilitas gedung, ruang rapat, kendaraan dinas dan ruang teleconference yang dapat diajukan permohonannya secara online. Pengembangan pelayanan fasilitas ini dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah (PAD). Selain itu, inovasi pada pelayanan internal dapat berupa mekanisme verifikasi administrasi pencairan dana melalui tim verifikasi, penggunaan sistem pengarsipan administrasi kegiatan di tingkat bagian/subbagian, penggunaan system register pemakaian BBM, sistem informasi penatausahaan BMD Lingkup Setda, serta system informasi rencana kebutuhan BMD Lingkup Setda.

Peluang pengembangan pelayanan Pimpinan oleh Biro Umum dapat berupa: pertama, revitalisasi sistem pengendalian internal oleh Gubernur. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan efektivitas kontrol internal oleh Gubernur kepada Perangkat Daerah dan instansi

lainnya di daerah, dengan menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi setiap bulannya. Kedua, revitalisasi system pengendalian internal oleh Wakil Gubernur dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan efektivitas kontrol internal oleh Wakil Gubernur kepada Perangkat Daerah terkait dalam rangka perannya sebagai Ketua Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.

Hambatan yang dihadapi oleh Biro Umum dalam pengembangan pelayanan ini datang dari aspek SDM yang masih kurang dari segi kualitasnya. Hal ini terlihat dari masih rendahnya tingkat penerapan budaya kerja seperti belum terlihatnya pelayanan yang ramah dari aparaturnya serta belum maksimalnya rancangan dan implementasi prosedur pelayanan tamu.

Dari uraian di atas, maka peta strategi dan scope kebijakan Biro Umum kedepannya dapat difokuskan kepada *Pertama, **Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pelayanan Tamu Rumah Tangga, Pimpinan dan Administrasi Keuangan Setda**; Kedua, **Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik***. Sedangkan kebijakan-kebijakan administrasi umum lainnya merupakan upaya Biro Umum sebagai lini pendukung kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan rekomendasi dan catatan strategis dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2021 yaitu:

1. Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana melalui pengadaan barang dan jasa dan pemeliharaan sarana prasarana yang dapat mendukung pelayanan Biro Umum, utamanya fasilitas pada beberapa gedung/asset yang dikelola serta sarana dan prasarana untuk kebutuhan Pimpinan.

2. Meningkatkan daya dukung personil melalui rekrutmen tenaga khusus yang dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan pelayanan Biro Umum.
3. Meningkatkan dukungan teknologi pada pelayanan Biro Umum seperti pemanfaatan aplikasi SiMiraSimpel, SisPensu, SiPintas dan lain-lain.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Biro Umum pada 5 (lima) layanan unggulan Biro Umum, yaitu Pelayanan Ruang Pertemuan, Pelayanan Penginapan di Istana Bung Hatta, Pelayanan Peminjaman Kendaraan dan Fasilitas Kedinasan, Pelayanan Penerimaan dan Pendistribusian Surat, dan Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Membayar.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Memperhatikan rumusan program dan besaran pagu indikatif pada rancangan awal RKPD Tahun 2021, dan membandingkannya dengan hasil analisis kebutuhan anggaran Tahun 2021, dapat dilihat bahwa 1 (satu) program yang direncanakan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun besaran KUA/PPAS programnya berbeda cukup jauh.

Jumlah dana yang diindikasikan pada RKPD sudah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan perangkat daerah. Total pagu indikatif RKPD sebesar **Rp. 115,107 milyar**.

Kebutuhan anggaran ini didasarkan pada besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan fisik gedung serba guna Pemprov di Padang Baru rehab rumah jabatan KDH/WKDH/Sekda, dan rehab ruang kerja KDH/WKDH/Sekda serta Pembangunan Mesjid di Area Gubernuran. Selain itu, ada penambahan kegiatan Pengelolaan Pemakaian Mess Bukit Lampu yang merupakan kebutuhan operasional Mess di Bukit

Lampu. Penambahan kebutuhan lainnya merupakan analisis kebutuhan biaya belanja rutin yang setiap tahunnya selalu meningkat, seperti kenaikan tarif listrik PLN, tarif PDAM, telfon, kenaikan beban operasional dan pemeliharaan gedung kantor serta sarana lainnya, sampai kepada kenaikan belanja rumah tangga pimpinan dan yang cukup besar adalah meningkatnya kunjungan Tamu Pemda.

Hasil review rancangan awal RKPD Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Provinsi Sumatera Barat

Nama PD: Biro Umum (Setda)

No	Rancangan Awal RKPD					KUA/PPAS 2022					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Sumatera Barat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	89.024.556.272	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Sumatera Barat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	89.024.556.272	
	Jumlah				89.024.556.272					89.024.556.272	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021

Perangkat Daerah: Biro
Umum Setda

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Setelah mencermati kebijakan nasional yang berkaitan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak memiliki program yang berkaitan dengan kebijakan nasional, karena fungsi Biro Umum yang merupakan fungsi penunjang/*supporting unit* pada sekretariat daerah dan bukan Perangkat Daerah teknis.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan arah atau kondisi akhir yang diharapkan yang akan diwujudkan atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Pada Tahun 2023, di tetapkan 2 (dua) Sasaran dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja Biro Umum. Sasaran 1 “Meningkatnya Kepuasan Stakeholders di bidang Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH, Pelayanan Pimpinan dan Pelayanan Administrasi Keuangan Setda” diukur dengan 4 (empat) indikator, yaitu “IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH”, “IKM Pelayanan Pimpinan” dan “IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda. Sasaran 2 “Terwujudnya Tata Kelola Organisasi” diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja”.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja 2023 Biro Umum

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET			KET
					2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	Meningkatnya Kepuasan <i>Stakeholders</i> di bidang Pelayanan Tamu, Pelayanan Pimpinan dan Pelayanan Administrasi Keuangan Setda	IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH	88,31 (Sangat Baik)	88,31 (Sangat Baik)	88,31 (Sangat Baik)	
				IKM Pelayanan Pimpinan	88,31 (Sangat Baik)	88,31 (Sangat Baik)	88,31 (Sangat Baik)	
				IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda	88,31 (Sangat Baik)	88,31 (Sangat Baik)	88,31 (Sangat Baik)	
			Terwujudnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	70 (BB)	70 (BB)	70 (BB)	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”, serta penjabaran dari Misi ke-7 “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas”, pada Tujuan “Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dengan Aparatur yang Melayani”, Sasaran Ketiga “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”, dengan Indikator Kinerja “Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan”.

Selanjutnya dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Biro Umum serta rumusan tujuan dan sasaran yang telah diuraikan pada Renstra Perubahan Biro Umum 2021-2026, dan mencermati hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, maka dirumuskan **1 (satu) program** dengan **11 (sebelas) kegiatan dan 48 (empat puluh delapan) sub kegiatan** yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023.

Pelaksanaan 1 (satu) program dengan 11 (sebelas) kegiatan dan 48 (empat puluh delapan) sub kegiatan tersebut, digulirkan untuk menunjang fungsi utama Biro Umum sebagai yang terdepan dalam Pelayanan Tamu Pemda dan Pelayanan Pimpinan serta Kesekretariatan. Semua kegiatan akan dilaksanakan di Kota Padang, namun demikian sebagian pekerjaan fisik seperti pembangunan atau rehabilitasi gedung milik Biro Umum, ada yang berada di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Bukittinggi.

Dana yang dibutuhkan untuk menjalankan 1 (satu) program dengan 11 (sebelas) kegiatan dan 48 (empat puluh delapan) sub kegiatan pada Tahun 2023 sebesar **Rp. 146.329.823.668,-**. Jumlah tersebut naik sekitar 64% dari pagu dana Tahun 2021 yang sebesar **Rp. 89.024.556.272,-**.

Program dan kegiatan beserta rencana target kinerja dan anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 beserta Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
Dan Perkiraan Maju Tahun 2023
Provinsi Sumatera Barat
(Rp.)

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	UNSUR PENDUKUNG				153.590.442.115				148.599.075.600
4	01 SEKRETARIAT DAERAH				153.590.442.115				148.599.075.600
4	01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Padang	100%	153.590.442.115				148.599.075.600
4	01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Padang	100%	554.838.600				674.391.700
4	01 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Padang		241.976.000				300.000.000
4	01 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	Padang		79.153.000				100.000.000
4	01 01 1.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja SKPD yang disusun	Padang		128.400.000				158.455.600
4	01 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	Padang		105.586.200				115.936.100
4	01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan		100%	44.201.124.227				44.537.296

4	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	Padang		43.215.142.227				43.587.496.050
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	Padang		450.000.000				450.000.000
4	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	Padang		150.000.000				200.000.000
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	Padang		150.872.100				200.000.000
4	01	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	Padang		60.000.000				60.000.000
4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	Padang		200.000.000				200.000.000
4	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah		100%	950.000.000			100%	1.050.000.000
4	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	Kota Padang		150.000.000	APBD		3000 buah	150.000.000
4	01	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang diasuransikan	Kota Padang		700.000.000	APBD		12 bulan	800.000.000
4	01	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorinya	Padang		100.000.000				100.000.000
4	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	Kota Padang		100.000.000	APBD		12 Bulan	100.000.000

4	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	Padang		100.000.000				100.000.000
4	01	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah		100%	150.000.000			100%	150.000.000
4	01	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan retribusi kewenangan perangkat daerah	Kota Padang		50.000.000	APBD			50.000.000
4	01	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen analisa dan pengembangan Retribusi kewenangan Perangkat Daerah	Padang		100.000.000				100.000.000
4	01	01	1.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Sosialisasi atau penyebarluasan informasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah pemungut retribusi	Padang		300.000.000				300.000.000
4	01	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah	Kota Padang		100.000.000	APBD			100.000.000
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			800.000.000				800.000.000
4	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Padang		600.000.000				600.000.000
4	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian (pengelolaan gaji berkala, penyusunan DUK, eksekusi pola mutasi internal, kenaikan pangkat PNS, Pensiun, mengkoordinir penyusunan ANJAB ABK, evaluasi jabatan, cuti dll) yang disusun	Padang		200.000.000				200.000.000
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN dan NON ASN yang mengikuti kegiatan capacity building	Padang		300.000.000				300.000.000
4	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi dan Jumlah bimtek yang dilaksanakan	Padang		200.000.000				200.000.000

4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah			24,416,623,300					23.450.000.000
4	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan; atau	Padang		150.000.000					150.000.000
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dengan menyebutkan nama BMD nya sesuai lampiran (Jumlah)	Kota Padang		683.278.900	APBD				100.000.000
4	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan ; atau	Kota Padang		633.344.400					200.000.000
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dengan menyebutkan nama BMD nya sesuai lampiran (Jumlah)	Kota Padang		500.000.000	APBD				500.000.000
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan; atau	Kota Padang		250.000.000					300.000.000
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dengan menyebutkan nama BMD nya sesuai lampiran (Jumlah)	Kota Padang		100.000.000					100.000.000
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang dilayani	Kota Padang	1 Tahun	10.000.000.000	APBD		1 Tahun	10.000.000.000	
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	Kota Padang	1 Tahun	11.900.000.000	APBD		1 Tahun	12.000.000.000	
4	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis SKPD yang dikelola	Kota Padang	1 Tahun	100.000.000	APBD		1 Tahun	100.000.000	
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		100%	24.646.458.400			100%	20.448.296.000	
4	01	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan dinas jabatan baru	Kota Padang		6.948.296.000	APBD			6.948.296.000	
4	01	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan baru	Kota Padang		8,503,988,000	APBD			6.000.000.000	

4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel; atau	Padang		3.500.000.000				1.500.000.000
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya baru; atau	Padang		1.694.174.400				2.000.000.000
4	01	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dibangun	Padang		6.000.000.000				5.000.000.000
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	15,652,314,568			100%	16.250.000.000
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	Kota Padang	12 Bulan	250.000.000	APBD		12 Bulan	250.000.000
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan Air (PDAM), Listrik, Telepon, Internet dan TV Kabel yang dibayarkan	Kota Padang	12 Bulan	4.200.000.000	APBD		12 Bulan	5.000.000.000
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Padang		1,866,800,000				1.000.000.000
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	Padang		9.335.514.568				10.000.000.000
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik		100%	10,696,582,700				9.516.387.900
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas yang dipelihara	Padang		516.387.900				516.387.900
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Padang		2.321.690.000				2.500.000.000
4	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel;	Padang		500.000.000				500.000.000

4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;	Padang		500.000.000				500.000.000
4	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	Padang		6,358,504,800				4.000.000.000
4	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab	Padang		500.000.000				2.500.000.000
4	01	01	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Peesentase Administrasi Keuangan dan Operasioal Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang terfasilitasi dengan baik		100%	4.900.000.000				4.900.000.000
4	01	01	1.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Padang		250.000.000				250.000.000
4	01	01	1.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Padang		400.000.000				400.000.000
4	01	01	1.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Padang		250.000.000				250.000.000
4	01	01	1.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama 1 tahun anggaran	Padang		4.000.0000.000				4.000.0000.000
4	01	01	1.12		Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah	Persentase Kerumahtanggan Sekretariat Daerah yang terfasilitasi dengan baik		100%	22.500.000.000				11.500.000.000
4	01	01	1.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Padang		10.000.000.000				10.000.000.000

4	01	01	1.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Padang		8.500.000.000				8.500.000.000
4	01	01	1.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Padang		4.000.000.000				4.000.000.000
					Jumlah				153.590.442.115				148.599.075.600

BAB V

PENUTUP

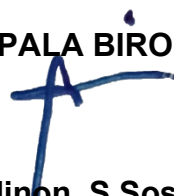
Rencana Kerja (RENJA) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 merupakan pedoman bagi seluruh Bagian pada Biro Umum dalam merencanakan dan melaksanakan program kegiatan agar memiliki satu persepsi yang sama tentang tujuan dan sasaran strategis organisasi. Dengan demikian pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dapat tercapai dengan hasil yang optimal.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat. Karenanya, untuk mencapai keberhasilan tersebut perlu didukung oleh anggaran, SDM yang profesional dan sarana prasarana yang memadai.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Biro Umum tahun 2023 ini disusun untuk memberi gambaran tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Padang, Januari 2022

Plt. KEPALA BIRO UMUM,



Syefdinon, S.Sos. M.M.

Pembina Tk. I,

NIP. 19720713 199803 1 002